Forum Dosen

Kebijakan Tidak Naik Kelas dan Tantangan Mewujudkan Pendidikan Inklusif

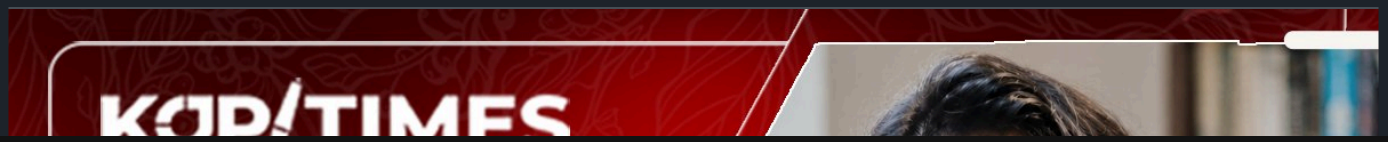
Pendidikan yang bermutu bukan hanya pendidikan yang mampu menilai capaian murid, melainkan pendidikan yang mampu menindaklanjuti hasil penilaian tersebut dengan dukungan yang tepat.

TIMES Indonesia, 9 Oktober 2026, 10:28 WIB

3k

Apri Damai Sagita Krissandi - Kopi Times

Hainor Rahman



Terpopuler



Apri Damai Sagita Krissandi, Dosen FKIP Universitas Sanata Dharma.

A- A A+

SLEMAN – Pada 2 Oktober 2026, dalam Konvensi Pendidikan Indonesia XII di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa kebijakan tidak naik kelas berpeluang diberlakukan kembali mulai tahun ajaran 2027 apabila rekomendasi tersebut disetujui. Ia menyoroti fenomena rajin malas sama saja (RMS) yang dinilai berpotensi melemahkan kesungguhan murid dalam belajar.

Wacana ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Namun, peningkatan mutu pendidikan tidak seharusnya disederhanakan menjadi persoalan penentuan murid yang layak naik kelas dan murid yang harus mengulang.

01 Rahasia Surat Al-Kahfi: Membaca Kehidupan di Balik Sebuah Gua
4 jam yang lalu • 14.3k

02 Luka Modric Masih Buka Peluang Pulang ke Real Madrid, tapi Ada Syaratnya
5 jam yang lalu • 13.4k

03 Kebakaran Hutan di Taliabu Terbesar di Maluku Utara
3 jam yang lalu • 13.1k

04 Inside The Lion Home, Cara Arema FC Kenalkan Sisi Lain Stadion Kanjuruhan kepada Aremania
11 jam yang lalu • 12.4k

05 Stroke Usia Muda Hampir Dua Kali Lipat, Ini Faktor Risikonya
10 jam yang lalu • 11.7k



Ketika sekolah dituntut semakin inklusif dan mampu melayani keragaman kemampuan murid, kebijakan tidak naik kelas perlu dikaji secara kritis: apakah benar-benar menjadi solusi bagi persoalan pembelajaran?

Pertama-tama, perlu diluruskan bahwa kenaikan kelas dalam sistem pendidikan Indonesia bukanlah proses yang berlangsung secara otomatis tanpa penilaian. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan mengatur bahwa kenaikan kelas mempertimbangkan laporan kemajuan belajar murid selama satu tahun ajaran.

Dengan demikian, evaluasi terhadap perkembangan murid sebenarnya telah menjadi bagian dari sistem pendidikan. Persoalannya bukan terletak pada perlu atau tidaknya evaluasi, melainkan pada tindak lanjut yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Apabila seorang murid belum mencapai kompetensi yang diharapkan, apakah mengulang kelas merupakan pilihan paling tepat, atau justru diperlukan intervensi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan murid?

Pendidikan memang menuntut proses, usaha, disiplin, dan perkembangan. Namun, proses tersebut tidak semestinya direduksi menjadi sekadar pengelompokan murid berdasarkan ketercapaian standar tertentu.

Temukan lebih banyak

Berita Indonesia

Berita nasional

berita

Ketika seorang murid mengalami kesulitan belajar, sekolah perlu mengevaluasi bukan hanya kemampuan murid, melainkan juga efektivitas strategi pembelajaran, kecukupan pendampingan, serta kesesuaian metode pengajaran yang diterapkan.

Capaian belajar merupakan hasil interaksi berbagai faktor. Oleh karena itu, ketertinggalan murid tidak dapat selalu dipandang sebagai persoalan yang sepenuhnya bersumber dari diri murid itu sendiri.

BACA JUGA



Seni Memindahkan Orang Ala Istana

Mengulang kelas juga tidak dengan sendirinya menjamin peningkatan kemampuan akademik. Murid yang belum lancar membaca, misalnya, tidak otomatis menjadi lancar hanya karena harus kembali mempelajari materi pada tingkat kelas yang sama. Demikian pula, murid yang mengalami hambatan kognitif membutuhkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya.

Tanpa perubahan strategi pembelajaran, pendampingan yang memadai, dan intervensi yang terarah, pengulangan kelas berisiko membuat murid menghadapi kesulitan yang sama. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas tidak dapat diperlakukan sebagai solusi tunggal bagi persoalan ketertinggalan belajar.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dihubungkan dengan komitmen untuk mewujudkan **pendidikan inklusif**. Sekolah diharapkan menerima murid dengan latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajar yang beragam, termasuk murid penyandang disabilitas. Guru pun dituntut mampu mengakomodasi perbedaan tersebut melalui strategi pembelajaran yang adaptif.

Dalam konteks ini, penerapan standar yang seragam tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan individual murid justru berpotensi bertentangan dengan semangat pendidikan inklusif.

Perbedaan kecepatan belajar tidak serta-merta menunjukkan rendahnya potensi seorang anak. Sebagian murid membutuhkan waktu, dukungan, dan pendekatan yang berbeda untuk mencapai perkembangan optimal.

Oleh karena itu, penting untuk membedakan murid yang kurang memiliki motivasi belajar dari murid yang memiliki kemauan belajar, tetapi menghadapi hambatan tertentu.

Persoalan motivasi memerlukan strategi untuk menumbuhkan keterlibatan dan tanggung jawab belajar. Sementara itu, hambatan akademik, kondisi sosial, masalah psikologis, dan

kebutuhan khusus memerlukan bentuk dukungan yang berbeda.

Kebijakan pendidikan yang efektif harus mampu mengenali keragaman penyebab kesulitan belajar tersebut. Menempatkan berbagai persoalan itu semata-mata dalam kerangka kenaikan kelas berisiko mengabaikan akar masalah yang sesungguhnya.

BACA JUGA



PISA Jeblok: Generasi Cepat Membaca, Lambat Memahami

Pendidikan inklusif juga tidak cukup diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada semua anak untuk masuk ke sekolah yang sama. Inklusi menuntut perubahan dalam praktik pembelajaran, sistem penilaian, penyediaan layanan pendampingan, serta keterlibatan orang tua.

Sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, merancang intervensi yang relevan, dan memantau perkembangan mereka secara berkelanjutan.

Tanpa dukungan tersebut, penerimaan terhadap keragaman murid berisiko berhenti pada tataran administratif. Sekolah menerima semua anak, tetapi belum tentu memiliki sumber daya dan mekanisme yang memadai untuk memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Dalam situasi demikian, pemerintah seharusnya memprioritaskan penguatan sistem pendampingan belajar sebelum menempatkan kebijakan tidak naik kelas sebagai salah satu instrumen utama peningkatan mutu.

Penguatan literasi dan numerasi dasar, peningkatan kompetensi guru, penyediaan layanan pendidikan khusus, pengembangan asesmen diagnostik, serta mekanisme pemantauan perkembangan murid perlu menjadi perhatian utama.

Hasil evaluasi semestinya digunakan untuk menentukan bentuk bantuan yang diperlukan murid dan memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, penilaian tidak berhenti pada identifikasi kekurangan, tetapi menjadi dasar bagi tindakan pendidikan yang konkret.

Kritik terhadap wacana tidak naik kelas bukan berarti mengabaikan pentingnya evaluasi atau meniadakan tanggung jawab murid dalam belajar. Persoalan utamanya adalah memastikan bahwa keputusan pendidikan benar-benar berpihak pada perkembangan murid.

Jangan sampai murid yang paling membutuhkan dukungan justru menjadi pihak yang paling menanggung konsekuensi ketika sistem pembelajaran belum mampu mengakomodasi kebutuhannya.

BACA JUGA



MBG di Negara Lain

Kebijakan pendidikan seharusnya mendorong sekolah untuk menemukan cara yang lebih efektif dalam membantu murid berkembang, bukan sekadar menentukan siapa yang belum memenuhi standar.

Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari ketegasan dalam menetapkan persyaratan kenaikan kelas. Keberhasilan juga perlu dilihat dari kemampuan sekolah dan negara dalam memastikan bahwa setiap murid memperoleh kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya.

Sebelum memperkuat kembali kebijakan tidak naik kelas, pemerintah perlu memastikan bahwa dukungan pembelajaran telah tersedia dan dapat diakses secara memadai oleh seluruh murid.

Tantangan utama pendidikan bukan sekadar menentukan siapa yang dapat melanjutkan ke kelas berikutnya, melainkan membangun sistem yang mampu mencegah murid tertinggal tanpa memperoleh bantuan yang diperlukan.

Pendidikan yang bermutu bukan hanya pendidikan yang mampu menilai capaian murid, melainkan pendidikan yang mampu menindaklanjuti hasil penilaian tersebut dengan dukungan yang tepat.

Dalam mewujudkan pendidikan inklusif, setiap kebijakan semestinya diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar, mengurangi hambatan, dan memastikan bahwa keragaman kemampuan murid tidak menjadi alasan untuk mengabaikan hak mereka untuk berkembang.

***

*) Oleh : *Apri Damai Sagita Krissandi*, *Dosen FKIP Universitas Sanata Dharma.*

*) *Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id*

*) *Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata.*

*) *Sertakan nama penulis, profesi beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.*

*) *Naskah dikirim ke https://kopi.times.co.id/*

*) *Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.*

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.

Apri Damai Sagita Krissandi | Pendidikan Inklusif

Edisi Pagi Kamis, 8 Oktober 2026: E-Koran, Bacaan Positif Masyarakat 5.0



Edisi Pagi Kamis, 8 Oktober 2026

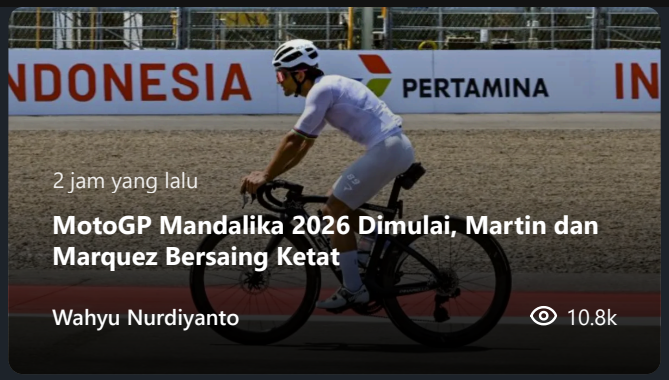
Edisi Sore Kamis, 8 Oktober 2026

Edisi Pagi Kamis, 8 Oktober 2026

Edisi Sore Rabu, 7 Oktober 2026

Edisi Pagi Rabu, 7 Oktober 2026

Lihat Edisi Selengkapnya →



2 jam yang lalu

MotoGP Mandalika 2026 Dimulai, Martin dan Marquez Bersaing Ketat

Wahyu Nurdiyanto · 10.8k



14 jam yang lalu

Pemkab Malang Ingin KCC Jadi Etalase Wisata dan UMKM

Achmad Fikyansyah · 14.5k



2 jam yang lalu

UIN Sunan Kalijaga dan UIN Malang Pimpin Peringkat Kualitas Riset Nasional

Antara · 5k



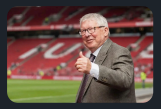
Haaland Ajak Manchester City Bersatu di Tengah Skandal Finansial

3 jam yang lalu



Tiga Tahun Pensiun, David Silva Gabung Klub Hong Kong

3 jam yang lalu



Sir Alex Ferguson Takut Tak Sempat Saksikan Stadion Baru Manchester...

4 jam yang lalu



Luka Modric Masih Buka Peluang Pulang ke Real Madrid, tapi Ada...

5 jam yang lalu



Startup NextDev Berpeluang Masuk Program Pengembangan Pemerintah

18 jam yang lalu



OJK: Dampak Pembekuan Saham Indonesia di Indeks MSCI Kini Lebih...

18 jam yang lalu



Prabowo Tegaskan Investasi di Indonesia Aman

20 jam yang lalu



OJK Cabut Izin Porto Ventura Kapital, Gagal Pulihkan Kondisi Perusahaan

20 jam yang lalu



Pendidikan Tinggi Jangan Meluluskan Ketidakjujuran

4 jam yang lalu



Empat PTKIN Masuk Top 10 Kampus Indonesia dengan Kualitas Riset...

13 jam yang lalu



Mendikdasmen Wacanakan Siswa Tak Otomatis Naik Kelas, Ini Respons...

18 jam yang lalu



Prof Raden Bambang Sumarsono Temukan ITP-Model untuk...

20 jam yang lalu

TIMES INDONESIA

Portal berita positif yang menyajikan informasi terkini tentang peristiwa, cek fakta, ekoran, politik, entertainment, kuliner, gaya hidup, wisata, dan kopi times

Ikuti Kami

Kanal Utama

- Nasional
- Internasional
- Politik
- Ekonomi
- Olahraga
- Entertainment

Kontak Kami

Jl. Besar Ijen No.90, Oro-oro Dowo, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65116

(0341) 563566

redaksi@timesindonesia.co.id

Berlangganan

Dapatkan berita terbaru langsung di inbox Anda

Email Anda

Berlangganan

Member Of

SUPPORTED BY

© 2025 TIMES Indonesia. All rights reserved.